KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Minta Presiden Pimpin Usaha Hadapi Perubahan Iklim
Tanggal : Kamis, 12 Desember 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 29

DPR Minta Presiden Pimpin Usaha Hadapi Perubahan Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup mendukung upaya konsolidasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim.

TEMPO/BUDI SETYARSO



Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Ruandha Agung Sugardiman (kiri), Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, pada pembukaan paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim COP25 di Spanyol, kemarin.

Budi Setyarso
budi@tempo.co.id

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memimpin langsung usaha mengatasi perubahan iklim. Menurut dia, egosektoral di Indonesia masih tinggi, yang membuat isu lingkungan ini belum menjadi perhatian utama masyarakat.

"Kalau Presiden yang memimpin, konsolidasi aksi dalam menghadapi perubahan iklim ini menjadi lebih cepat," kata Muhaimin dalam sesi pertama Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP25, di Madrid, Spanyol, Rabu pagi waktu setempat.

Menurut Muhaimin, tantangan perubahan iklim belum menjadi agenda massal di Indonesia. Isu ini hanya menjadi perhatian kelompok terbatas. Ia menyatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan sering mengeluhkan rendahnya perhatian badan legislatif daerah dalam isu penting ini.

Ia menilai ada dua penyebab isu perubahan iklim kurang mendapat perhatian. Pertama, akibat pendidikan dan sistem informasi yang belum banyak menyentuhnya. Di kelompok muda perkotaan, kata dia, bisa jadi informasinya lebih diterima daripada yang lain. Penyebab kedua, terlalu banyak isu yang muncul di Indonesia. "Sekarang saja yang lagi ramai isu masa jabatan presiden tiga kali," ujarnya sambil tertawa.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menyatakan, peran legislasi dalam mendorong perubahan iklim agar menjadi isu publik sangatlah penting. Sinergi berbagai kelompok strategis perlu dikonsolidasikan. Menurut dia, penyelenggaraan COP13 di Bali sebenarnya bisa dijadikan momentum. "Sayangnya, momentum ini lenyap begitu saja dengan berbagai sebab," ujarnya.

Pengalokasian anggaran untuk menghadapi perubahan iklim juga merupakan peran penting lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat maupun daerah, disebut Muhaimin harus memberikan alokasi yang cukup. Apalagi, kelompok yang paling terkena dampak perubahan iklim adalah masyarakat kecil, termasuk petani.

"Melalui forum ini, saya memohon kepada Presiden Jokowi untuk memimpin langsung usaha menghadapi perubahan iklim ini," kata Muhaimin.

Ia menilai, kepemimpinan Presiden penting agar semua pemangku kepentingan segera bergerak. Pengusaha, industri, pelaku ekonomi, tokoh adat, dan kelompok lain bergerak aktif. Presiden juga bisa berperan dalam diplomasi internasional. Berbicara dalam bahasa Indonesia, ia kemudian menyatakan, "Jangan hanya Amerika Serikat yang bisa *ngambek* dari COP karena kepentingannya terganggu. Satu kali kita bisa melakukannya jika perlu. Yang ini tidak usah diterjemahkan."

Muhaimin lalu menyampaikan penilaian di publik yang menganggap COP adalah forum negara maju untuk "*mecuti*"—memerintah dengan paksa—negara berkembang. Dengan diplomasi yang dipimpin Presiden, kata dia, Indonesia bisa memimpin negara berkembang untuk balik "*mecuti*" negara maju. "Untung kata '*mecuti*' tidak ada terjemahannya. Jadi, jangan diterjemahkan," katanya, diiringi derai tawa pengunjung dari Indonesia.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dahong, menyatakan sepakat dengan perlunya konsolidasi berbagai pihak untuk menghadapi dampak perubahan iklim. ●

IKLAN